



PENETAPAN

Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1205125112800002, tempat dan tanggal lahir

Teladan Rejo, 11 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK 1205120408800003, tempat dan tanggal lahir

Sanggalima, 04 Agustus 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman d/a x (paman) di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun II Teladan Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/52/IV/2006, tertanggal 24 April 2006;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, umur 15 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun; dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 (tiga tahun pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga, sebab Penggugat mesti memintanya terlebih dahulu kepada Tergugat lalu Tergugat memberikannya dan itupun yang diberikan oleh Tergugat tidak pernah mencukupi;

- b. Tergugat diketahui suka berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 5 tahun 11 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan paman Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dengan oran tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Penggugat dan ternyata atas nasihat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 07 Desember 2021 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb



Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Penggugat dan ternyata atas nasihat tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis tanggal 07 Desember 2021 untuk mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim bersepakat bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021 telah selesai karena dicabut, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021 telah dikabulkan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 29 November 2021 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2128/Pdt.G/2021/PA.Stb



Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)